

## PENGUNGSI, UKIP, DAN EUROSKEPTISME: MEMAHAMI EKSISTENSI KEAMANAN DI INGGRIS TAHUN 2016

Muh. Rizky Hikmatullah Idrus<sup>1</sup>, Harisa Firdaus Pahlawan<sup>2</sup>  
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, Bandung  
<sup>1</sup>muh23002@mail.unpad.ac.id, <sup>2</sup>harisa23001@mail.unpad.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to analyze the form of security threats built through the relational relationship between refugees, UKIP, and Euroscepticism in the UK, as well as the formation of the discourse of security threats that occurred in the UK in 2016, using the theories of securitization, economic security, and Euroscepticism. The research method used in this article is descriptive-analytic, with data collection techniques in the form of a literature review sourced from books, journals, articles, official internet sites, and reports related to this research. The results of this study show that the presence of refugees in the UK creates economic inequality due to unequal economic distribution and is signaled as an economic threat as a referent object. The entry of Euroscepticism in the UK has influenced the public opinion of the UK society, which makes it easier for the right-wing party UKIP to exist and be popular.*

**Keywords:** Economic Security, Euroscepticism, UK, UKIP, Refugees

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana menurut Konvensi PBB 1951, pengungsi adalah istilah yang digunakan untuk mengistilahkan sebuah kelompok yang meninggalkan negara asalnya akibat persekusi yang berasal dari negara mereka dengan berbagai alasan tertentu (UNHCR, 1951). Kehadiran pengungsi tentu berakar dari adanya konflik yang berkepanjangan atau permasalahan dari internal negara mereka sehingga memicu aktivitas migrasi tersebut. Hal ini tentu saja tidak dapat diprediksi sebab konflik internal tiap negara dipengaruhi oleh berbagai elemen yang dimana hanya negara tersebutlah yang berkewajiban dalam mengatasi konflik tersebut. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan potensi yang diakibatkan oleh konflik tersebut maka pembentukan dan penetapan konvensi PBB 1951 dan protokol 1967 adalah solusi dalam mengakses hak-hak pengungsi di negara lain sebagai negara tujuan.

Namun, tidak semua negara berkewajiban dalam memenuhi hak pengungsi sebab hal tersebut didasarkan pada status keanggotaan setiap

negara dalam menetapkan/meratifikasi konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. Oleh karena itu, negara yang tidak mengadopsi konvensi dan protokol tersebut, tidak berkewajiban dalam memenuhi hak tersebut, melainkan diwakilkan oleh perwakilan UNHCR di negara tersebut sehingga kewenangan dalam menetapkan status pengungsi dilakukan oleh UNHCR. Sebaliknya, negara yang meratifikasi konvensi maka berhak dalam menentukan status pengungsi yang bekerjasama dengan negara asal dan UNHCR, serta berkewajiban dalam memenuhi hak pengungsi di negaranya (Suwardi, 2004). Dengan ini, pemenuhan hak-hak pengungsi sebagai korban dari dampak konflik dari asal negara mereka dapat terjamin dan terpenuhi.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengungsi menjadi topik utama di benua Eropa. Krisis pengungsi yang terjadi disebabkan oleh adanya ketidakstabilan ekonomi-politik yang terjadi di negara-negara kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah (Idrus, 2021). Hal tersebut memicu lahirnya sebuah lonjakan pengungsi ke negara-negara yang dianggap aman bagi mereka, dengan mengharapkan kesejahteraan bagi kelangsungan hidup mereka. dan tujuannya adalah negara-negara di benua Eropa yang dianggap memiliki tingkat perekonomian yang cukup menjanjikan. (Rahmat, 2020) Akibat dari krisis tersebut, maka Uni Eropa memiliki kewajiban dalam menangani krisis pengungsi tersebut dengan memanfaatkan sistem suaka dan pengungsi Uni Eropa, *Dublin Regulation*. Namun, akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan maka Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Council Decision* (EU) 2015/1523 yaitu suatu kebijakan yang mendistribusikan pengungsi secara merata ke seluruh negara Uni Eropa sesuai dengan kondisi kemakmuran dan ekonomi negara tersebut (European Council, 2015). Kebijakan tersebut pun mengalami kegagalan disebabkan perbedaan persepsi tiap negara dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan tingkat perekonomian dan kesejahteraan di setiap negara Uni Eropa.

Implikasi dari kegagalan Uni Eropa dalam merealisasikan *Council Decision* (EU) 2015/1523 telah melahirkan *Euroscepticism*, sebuah paham yang melemahkan konstruksi atas nilai-nilai tertentu seperti negara-bangsa,

identitas nasional dan kedaulatan negara (Hainsworth, 2008), di mana dalam konteks ini *Euroscepticism* dipahami akan melemahkan konstruksi integrasi dan entitas Uni Eropa. *Euroscepticism* pun berkemungkinan mendorong politik anti Uni Eropa yang populis dan menggagalkan usaha para pemimpin Eropa untuk merealisasikan proyek mereka. José Manuel Barroso, Presiden Komisi Eropa, mengatakan bahwa Eropa akan terancam oleh kebangkitan populisme dan nasionalisme di seluruh Uni Eropa yang kemudian diperhadapkan pada pengangguran, ketidakpastian, dan ketidaksetaraan yang semakin meningkat (Traynor, 2013). Hal ini tentu memicu kepanikan pada masyarakat Uni Eropa sebab sebelumnya telah terjadi *Euro Crisis* yang berdampak terhadap negara-negara Eropa (Hubé et al., 2016), serta menyebabkan jatuhnya perekonomian Uni Eropa yang ditandai dengan turunnya PDB Uni Eropa sebesar 4,1% dan produktivitas industri sebesar 20% (Milio, 2014).

Selain itu, berkembangnya *Euroscepticism* juga memicu lahirnya politik gaya populis di Eropa, yaitu partai sayap kanan (*Right Wing Parties*) yang menolak integrasi Uni Eropa atas dasar argumen kedaulatan dan klaim atas nilai budaya (Dutta, 2018). Mereka mendeklarasikan bahwa pandangan ideologi mereka adalah satu-satunya alternatif yang benar dan mendukung pandangan masyarakat marginal yang cenderung diam dalam merespon kebijakan *mainstream* Uni Eropa. Bahkan, mereka juga mengkritik kebijakan multikultural pemerintah dan bersikeras pada penegakan nilai-nilai budaya asli dan identitas nasional (Nourbakhsh et al., 2022). Kepercayaan publik terhadap Uni Eropa pun telah jatuh ke tingkat terendah pada beberapa negara besar Uni Eropa, salah satunya adalah *United Kingdom* (UK).

*United Kingdom*, salah satu negara Uni Eropa yang merealisasikan kebijakan pengungsi tersebut pun merasakan dampak yang sama dengan kehadiran pengungsi di negaranya. Tak terkecuali dengan hadirnya partai sayap kanan di UK yaitu *United Kingdom Independence Party* (UKIP). Kemunculan UKIP memiliki keterkaitan dengan perdebatan pada persoalan keanggotaan UK di Uni Eropa dalam beberapa dekade terakhir (Deacon & Wring, 2015). Pendekatan UKIP dalam memandang fenomena sosial

cenderung tradisional dan konservatif dengan menentang pernikahan sesama jenis, mencabut undang-undang hak asasi manusia, serta mengeluarkan UK dari konvensi pengungsi Uni Eropa; sebab hal tersebut dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi UK. Sebelumnya partai tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perpolitian UK. Namun dengan mengusung paham *Euroseptic*, partai tersebut dapat menjadi partai oposisi tunggal yang berhadapan dengan partai besar di UK (Burns, 2013). Bahkan, UKIP untuk sementara waktu berhasil menjadi partai nasional ketiga dalam hal dukungan rakyat dan masih menjadi partai terbesar di Parlemen Eropa (Evans & Mellon, 2019).

Dengan eksistensi pengungsi dan *Euroscepticism* yang terjadi di Uni Eropa, turut mempengaruhi opini publik di UK yang ditandai dengan jajak pendapat yang dilakukan pada masyarakat UK pada tahun 1975 dan 2015, dimana pada tahun 1975, masyarakat UK menganggap bahwa tidak banyak imigran di UK, sebaliknya pada tahun 2015, sebagian besar masyarakat UK beranggapan bahwa banyak imigran di UK. Selain itu, dalam survei *British Election Study* (BES) 2015, semua partai memiliki aspirasi untuk mengurangi imigrasi. Namun, hanya UKIP yang diyakini sebagai partai yang paling mungkin dalam menindaklanjuti pengurangan imigrasi, sehingga hal ini dapat memicu peralihan suara mayoritas terkait imigrasi ke UKIP (Evans & Mellon, 2019). Dengan banyaknya dukungan terhadap partai UKIP, merebaknya paham *Euroscepticism* yang disertai dengan kehadiran pengungsi di UK yaitu sebanyak 636.000 pengungsi pada tahun 2015 – walaupun jumlah alokasi pengungsi di UK cenderung lebih sedikit ketimbang negara Uni Eropa lainnya (Office for National Statistics, 2015). Hal ini cenderung memunculkan pertanyaan bahwa mengapa UK menganggap kehadiran pengungsi menjadi suatu ancaman bagi UK, padahal jumlah alokasi pengungsi di UK cenderung lebih sedikit dibandingkan negara Uni Eropa lainnya.

Penelitian Sofia Vasilopoulou dengan judul “*Varieties of Euroscepticism: The Case of the European Extreme Right*”. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk Euroskeptisisme yaitu (a) *rejecting*

*euroscepticism*, penolakan secara penuh keterlibatan negara dalam integrasi Eropa, baik secara prinsip, praktik, dan upaya untuk terlibat di masa depan; (b) *conditional euroscepticism*, penolakan terhadap keterlibatan negara dalam praktik dan proyeksi untuk bertahan maupun terlibat lebih dalam dalam integrasi Eropa; (c) *compromising euroscepticism*, toleran pada negara yang menganut prinsip dan turut aktif dalam integrasi Uni Eropa, tetapi tidak memperbolehkan negara untuk terlibat secara permanen dalam integrasi Eropa di masa depan (Vasilopoulou, 2003).

Penelitian Alex Szczerbiak dan Paul Taggart dengan judul “*Theorizing Party-Based Euroscepticism: Problems of Definition*”. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis *Euroscepticism* yaitu *soft* dan *Hard Euroscepticism*. *Soft Euroscepticism* dipahami bahwa negara diperbolehkan berada dalam Uni Eropa, akan tetapi negara harus lebih mengedepankan kepentingan nasionalnya dibandingkan kepentingan Uni Eropa; sedangkan *Hard Euroscepticism* dipahami sebagai penekanan agar keluar dari Uni Eropa (Szczerbiak, 2003).

Penelitian Helle Schroder Hansen dengan judul “*Euroscepticism: A Multidimensional Understanding of the Concept and a Comparative Analysis of Public Scepticism in Britain and Denmark*”. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan Euroskeptisisme di kedua negara tersebut. Di UK, skeptisisme dapat diidentifikasi dari dominan persepsi masyarakat yang melihat kurangnya manfaat yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap UK, sedangkan di Denmark skeptisisme dapat diidentifikasi dari dominan persepsi masyarakat yang melihat kurang demokratisnya Uni Eropa sebagai institusi. Namun, persamaan dari keduanya adalah kedua negara tersebut memilih kecenderungan yang tinggi dalam memperlihatkan identitas nasional mereka ketimbang identitas mereka sebagai negara Uni Eropa (Hansen, 2008).

Penelitian Carmen Schneider dengan judul “*Euroscepticism in Right-Wing Parties A Comparative of Three Emerging Right-Wing Parties*”. Penelitian ini berfokus pada tiga partai sayap kanan di negara Uni Eropa yaitu *Partij voor de Vrijheid* (PvV) di Belanda; *Alternative fur Deutschland* (AfD) di Jerman;

dan *United Kingdom Independence Party* (UKIP) di UK. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Partij voor de Vrijheid* (PvV) di Belanda, dan *Alternative fur Deutschland* (AfD) di Jerman tergolong pada kategori *reject euroscepticism*, yang menolak secara penuh keterlibatan kedua negara tersebut dalam integrasi Eropa, baik secara prinsip, praktik, dan upaya untuk terlibat di masa depan. Adapun *United Kingdom Independence Party* (UKIP) di UK tergolong *conditional euroscepticism*, menolak keterlibatan negara dalam praktik dan proyeksi untuk bertahan maupun terlibat lebih dalam dalam integrasi Eropa. Namun, UK memilih untuk memberikan toleransi untuk tetap mengadakan kerjasama dengan negara Uni Eropa selama memberikan keuntungan bagi UK walaupun bersikeras untuk menolak berintegrasi, maupun terlibat aktif di Uni Eropa (Schneider, 2014).

Oleh karena itu, secara tidak langsung hal ini dapat menjustifikasi bahwa terdapat hubungan relasional antara ketiga variabel yaitu pengungsi, *Euroscepticism* dan UKIP dalam membangun wacana ancaman keamanan di UK. Alhasil, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk ancaman keamanan yang terbangun melalui hubungan relasional antara pengungsi, UKIP, dan *Euroscepticism* di UK ?
2. Bagaimana pembentukan wacana ancaman keamanan yang terjadi di UK pada tahun 2016?

Dengan rumusan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan menyangkut fenomena pengungsi di UK, menjadi rujukan dan referensi dalam melihat fenomena pengungsi secara menyeluruh dan objektif di negara lain, serta dapat menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan yang memiliki fokus pada permasalahan pengungsi dan migrasi internasional.

## **PEMBAHASAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, Eropa diperhadapkan dengan krisis pengungsi yang diakibatkan oleh eskalasi di beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Persoalan pengungsi telah menjadi agenda

serius Uni-Eropa sejak terjadinya tragedi tragis yang terjadi di daerah mediterania dimana ditemukan hampir 800 orang tenggelam di lepas pantai Libya dalam perjalanan menuju Eropa (Fichtner, 2015). Migrasi pengungsi pun semakin berkembang hingga menurut laporan *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR), tercatat bahwa terdapat lebih dari 65 juta orang yang terdampar dan tidak memiliki tempat tinggal pada tahun 2015 di Eropa (Setiabudi, 2021). Kemudian, berdasarkan data Eurostat, terdapat lebih dari 2,5 juta permohonan suaka diajukan di Eropa pada tahun 2015 dan 2016 (Eurostat, 2019).

Banyaknya pengungsi yang bermigrasi ke Eropa membuat Uni Eropa melakukan berbagai cara dalam mengatasi hal tersebut, seperti mengurangi tekanan dan menghindari keruntuhan sistemik di negara-negara pinggiran; mengembangkan rute yang aman dan mengurangi kematian di laut dan perdagangan manusia; menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi para pengungsi pada saat kedatangan; mempercepat relokasi dan mengurangi keputusasaan akibat penundaan di kamp-kamp pengungsian; menyediakan kondisi yang sama bagi para pengungsi yang direlokasi, tanpa memandang negara tuan rumah; dan berinvestasi pada program-program integrasi untuk memerangi diskriminasi dan intoleransi (Llano, 2019). Namun, dengan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Uni Eropa disertai dengan kebijakannya dalam menangani persoalan tersebut, justru menimbulkan pro dan kontra di internal negara Uni Eropa itu sendiri (Heywood, 2014).

Berangkat dari dua persoalan terbesar di Uni Eropa yaitu krisis Yunani yang terjadi pada tahun 2009 dan krisis pengungsi di tahun 2016. Terjadinya krisis Yunani dilatarbelakangi dari tingginya tingkat inflasi perekonomian Yunani yang disebabkan oleh tingkat utang mereka yang tinggi terhadap PDB-nya, bahkan termasuk tertinggi di Eropa (Alfiyah & Andrianingsih, 2021). Hal ini memiliki dampak yang cukup fatal, pasalnya krisis yang terjadi berimplikasi terhadap penurunan drastis pada pertumbuhan GDP negara-negara *Eurozone* pada tahun 2009 (Kensy Dewi Asmiantyningsi, 2021).

Tidak berselang lama kemudian, Eropa pun diperhadapkan dengan persoalan kedua yaitu krisis pengungsi yang terjadi akibat konflik yang

berlarut di Timur Tengah, khususnya dampak dari konflik berkepanjangan di Suriah. Hal ini juga menuai pro dan kontra pada negara Uni Eropa, pasalnya beberapa negara menolak kehadiran pengungsi sebagaimana yang dilakukan oleh Austria dan Hungaria dan juga pada sebagian masyarakat Jerman dan Perancis (Taylor, 2007). Akibat ketidakmampuan Uni Eropa dalam merespon krisis yang ditimbulkan maka hal ini memberikan efek domino bagi negara-negara Uni Eropa dan berakibat pada lahirnya pandangan Euroskeptisisme (*Euroscepticism*) sebagai respon atas menurunnya kepercayaan masyarakat Eropa terhadap Uni Eropa. Dalam hal ini, Euroskeptisisme dipahami sebagai penggambaran atas perilaku skeptis terhadap eksistensi Uni Eropa.

Selanjutnya, fenomena Euroskeptisisme memiliki keterkaitan erat dengan munculnya partai sayap kanan (*right-wing party*). Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu krisis pengungsi sebagai implikasi dari kebijakan imigrasi yang cenderung gagal dalam mengatasi krisis, serta kehadirannya dijadikan sebagai memiliki hubungan dengan ancaman nasional negara Uni Eropa, serta Euroskeptisisme yang diidentikkan pada pemerintahan Uni- Eropa yang bertingkat-tingkat (Schneider, 2014). Hal ini juga berlaku di UK dimana hal ini ditandai dengan munculnya partai sayap kanan (*right-wing party*) *United Kingdom Independence Party* (UKIP).

UKIP terbentuk pada tahun 1993 yang bertujuan untuk mengkampanyekan agar UK keluar dari Uni Eropa dan mengembalikan status UK sebagai negara yang merdeka, demokratis, dan berdaulat. Selain itu terdapat beberapa prinsip yang dipegang oleh UKIP yaitu **patriotism** (harus mengutamakan kepentingan rakyat UK), **national democracy** (memegang kendali atas penentuan nasib sendiri secara nasional, dan dilaksanakan demi kepentingan rakyat UK), **political democracy** (reformasi sistem pemungutan suara untuk mewujudkan sistem proporsional yang lebih adil), **economic democracy** (ekonomi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan tertentu), dan **liberalism & traditionalism** (kebebasan berbicara dan diskusi bebas tentang ide dan keyakinan - sesuai dengan hukum tradisional) (UKIP, 2023).

Dengan keterlibatan UKIP di UK, tentu akan mewarnai dinamika perpolitikan UK, dimana hal ini diterbukti dengan posisi UKIP sebagai oposisi tunggal terhadap partai besar di UK, dikarenakan mengusung paham *Eurosceptic* (Burns, 2013).

Dalam dinamikanya, UKIP sebagai partai politik telah berupaya untuk menggaungkan ancaman atas kehadiran pengungsi di UK. Nigel Farage selaku pemimpin partai UKIP mengatakan:

*“Social media may scream that we should be doing more but the vast majority of public opinion says that until we get a grip on current immigration levels, we’re in no position to do anything more substantial in terms of refugees....Britain cannot cope with higher levels of immigration”* (Hadley Gamble, 2015)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nigel Farage, dapat diidentifikasi bahwa apa yang telah disampaikan oleh Nigel Farage bahwa media tidak dilarang mendikte apa yang harus dilakukan oleh masyarakat UK, namun Farage bersikukuh bahwa masyarakat UK harus memastikan langkah yang cermat terlebih dahulu dengan melihat apakah level imigrasi masih diambang normal atau tidak. Hal ini juga, dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ancaman bagi UK apabila ingin menerima lebih banyak pengungsi di negaranya. Apabila UK mengambil tindakan tersebut, maka hal itu akan memberikan konsekuensi tertentu bagi UK di masa depan. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa apabila UK menerima imigran dan pengungsi lebih banyak dari ambang batas normal maka akan menyebabkan permasalahan ekonomi yang lebih kompleks bagi UK di masa depan.

Namun, perlu disimak lebih lanjut bahwa Farage bersikeras tidak menolak kehadiran pengungsi di UK seutuhnya. Hal ini disampaikan dalam pidatonya yaitu sebagai berikut:

*“I’m not against immigration. Far from it. Migrants have qualities we all admire. Looking for a better life. They want to get on. I like that. We admire that”* (Farage, 2013)

Dari ungkapan tersebut, Farage selaku pemimpin UKIP menyatakan afirmasi bahwa kehadiran imigran bukanlah ancaman sesungguhnya bagi mereka. Namun, jumlah kedatangan imigran di UK yang ditakutkan dapat

memberi dampak yang cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat UK itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Farage yaitu sebagai berikut:

*“But more people came to this country in one year, 2010 than came in the thousand years before it... Half a million new arrivals a year. It’s just not sustainable” (Farage, 2013)*

Berangkat dari asumsi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ancaman bagi UK yang dilirik oleh UKIP adalah persentase kedatangan pengungsi yang ditakutkan dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat UK itu sendiri dari segi kesejahteraan sosial. Senada dengan hal tersebut, terdapat pula pernyataan selanjutnya mengenai keputusan yang harus diambil oleh UK oleh Nigel Farage dalam pidatonya yaitu sebagai berikut:

*“We know that only by leaving the union can we regain control of our borders, our parliament, democracy and our ability to trade freely with the fastest-growing economies in the world” (Farage, 2013)*

Dalam argumen tersebut, Nigel Farage menuturkan bahwa upaya rasional yang dapat dilakukan oleh negara UK adalah dengan cara meninggalkan Uni Eropa sehingga apabila hal tersebut dapat terealisasikan, akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian UK beserta dengan kesejahteraan yang diimpikannya. Hal ini tentu saja dilatarbelakangi dari pandangan Euroskepticisme yang telah eksis di Eropa, termasuk UK. Sebagaimana menurut Alex Szczerbiak dan Paul Taggar (Alex Szczerbiak, 2003) dalam mengklasifikasikan karakteristik *Hard Euroscepticism* yaitu penekanan agar keluar dari Uni Eropa. Hal ini juga selaras dengan penelitian Helle Schroder Hansen (Hansen, 2008) bahwa memilih kecenderungan yang tinggi dalam memperlihatkan identitas nasional mereka ketimbang identitas mereka sebagai negara Uni Eropa. Pembuktian tersebut dapat dilihat dari pidato Farage sebagai berikut:

*“We know that only by leaving the union can we regain control of our borders, our parliament, democracy and our ability to trade freely with the fastest-growing economies in the world. And £55 million a day, incidentally, we get that back as well... Because the fact is we just don’t belong in the European Union. Britain is different” (Farage, 2013).*

Adanya pernyataan tersebut, telah jelas bahwa Farage berusaha untuk meyakinkan pada pengikutnya bahwa UK begitu berbeda dengan Uni Eropa. UK bisa saja lebih sejahtera tanpa kehadiran Uni Eropa, sehingga Farage dengan yakin bahwa dengan keluar dari Uni Eropa merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi di UK. Hal ini tentu saja berkaitan dengan keamanan ekonomi di mana keamanan ekonomi mencakup pada kemampuan negara untuk melindungi tatanan sosial dan ekonomi masyarakatnya; menjaga integritas masyarakat; dan melindungi lingkungan ekonomi mereka. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan analisis tingkat mikro dimana dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat UK, mereka berupaya untuk menuntut akses kebutuhan fundamental mereka yang mencakup kebutuhan hidup. Pemikiran Farage juga secara tidak langsung didukung oleh pendekatan Sperling dan Kirchner yakni menempatkan negara agar dapat mendukung dan melindungi tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. (J, Sperling, 1997).

Dalam konteks ini, agen lokal (individu, rumah tangga, dan komunitas lokal) atau masyarakat UK berupaya untuk memenuhi atau mengamankan mata pencarian mereka dengan cara membatasi kehadiran pengungsi atau imigran yang masuk ke UK agar distribusi pemenuhan hak ekonomi dasar masyarakat UK dapat terdistribusikan dengan baik tanpa adanya kesenjangan dengan masyarakat asing (pengungsi atau imigran). Gambaran mengenai ketidakadilan pemerintah dalam menjamin akses tersebut disampaikan oleh Farage dalam pidatonya yaitu sebagai berikut:

*“They’re immigrant going to think, let’s send Dad over to get work in Britain. Find a job, and be eligible for child benefit for his three children – even though they aren’t living here. they received £60 a week. That migrants can come and immediately start drawing benefits? When we, the host country, is strapped for cash, when youth unemployment is at a million, when the NHS is groaning and the deficit is a burden on every family? I know it isn’t fair. And I know there isn’t a thing the Government can do about it. The only way this can be dealt with is by leaving the EU”. (Farage, 2013)*

Dengan pernyataan tersebut, dorongan terhadap masyarakat UK untuk mereformasi kebijakan ekonomi UK dinilai perlu, dimulai dari tingkat

struktural yaitu dengan keluar dari Uni Eropa. Alasan tersebut terbilang rasional sebab UK termasuk kedalam keanggotaan Uni Eropa, di mana hukum Uni Eropa tergolong hukum supranasional, hal ini menempatkan hukum yang diterapkan oleh Uni Eropa berlaku bagi seluruh anggotanya dan teratifikasikan ke dalam hukum nasional. Alhasil, upaya yang harus dilakukan adalah dengan keluar dari Uni Eropa dan mereformasi ulang kebijakan ekonomi UK agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional mereka. Pengambilan langkah kebijakan UK juga sesuai dengan keamanan ekonomi sebagaimana menurut Cable berkaitan terhadap aspek-aspek vital seperti perdagangan dan investasi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan sebuah negara untuk mempertahankan diri (Cable, 1995).

Melihat fenomena UKIP yang berupaya menggaungkan semangat untuk membatasi kehadiran pengungsi dan imigrasi di UK, tentu saja dilandasi oleh paham euroskeptisme yang melekat dengan masyarakat Eropa akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat Eropa terhadap kapabilitas Uni Eropa dalam menangani krisis yang terjadi. Namun, perlu diketahui bahwa pembentukan wacana ancaman keamanan yang terjadi di UK dapat dilihat dari perspektif sekuritisasi. Dalam teori sekuritisasi, dapat diamati bahwa upaya sekuritisasi yang terjadi di UK tidak terlepas dari pandangan Barry Buzan dalam *Copenhagen School* yang mengatakan bahwa setiap isu tertentu dapat tidak dipolitisasi (*non-politicized*), dipolitisasi (*politicized*), dan disekuritisasi (*securitized*).

Secara historis, UK telah menerima kehadiran pengungsi dan imigran di negaranya. Berawal dari akhir abad 16 hingga saat ini yang disertai dengan pengembangan kebijakan pengungsi UK selama berabad-abad (Refugee Week, 2015) maka tidak dapat dielakkan bahwa UK begitu erat kaitannya dengan pengungsi dan imigran. Apabila UK memiliki hubungan yang begitu erat dengan pengungsi dan imigran, maka hal tersebut akan menjadi kontradiktif apabila UK menolak kehadiran pengungsi dan imigran di negaranya. Alhasil, dengan asumsi tersebut maka hal yang perlu dilihat lebih lanjut adalah bagaimana proporsi dari distribusi aksesibilitas kesejahteraan

sosial dapat teralokasikan secara inklusif ke semua elemen bagi masyarakat UK, baik pengungsi dan imigran maupun masyarakat asli UK. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wacana krisis pengungsi yang terjadi di Eropa sebagai alasan bangkitnya euroskeptisisme, telah mempengaruhi opini publik masyarakat UK terhadap kehadiran pengungsi.

Singkatnya, sebelumnya isu pengungsi merupakan isu yang termasuk kedalam kategori tidak dipolitisasi (*non-politicized*). Namun, dengan masuknya paham euroskeptisisme di Eropa, termasuk UK maka hal tersebut berhasil mempengaruhi opini publik masyarakat UK terhadap pengungsi dan menyebabkan populernya partai sayap kanan yang ada di UK (UKIP), sehingga isu pengungsi tersebut dapat dikategorikan kedalam isu dipolitisasi (*politicized*) melalui aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) yaitu partai politik sayap kanan UKIP yang diwakilkan oleh pidato Nigel Farage selaku pemimpin UKIP.

Wacana yang digaungkannya pun menyasar pada aspek ekonomi yaitu bagaimana agar UK terlebih dahulu memperhatikan aspek ekonomi masyarakatnya dapat terpenuhi sebelum memprioritaskan permasalahan pengungsi dan imigran. Dengan adanya ketidakmerataan ekonomi tersebut akhirnya wacana yang digaungkan oleh UKIP pun berhasil menjadi objek referen (*referent object*). Dalam hal ini, objek referen diidentikkan sebagai keamanan ekonomi yang dikaitkan pada akses terhadap sumber daya, keuangan dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuasaan negara. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya dalam pidato Farage bahwa UK bisa saja lebih sejahtera apabila keluar dari Uni Eropa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara pengungsi, UKIP dan *Euroscepticism* di UK, dilihat dari upaya sekuritisasi isu pengungsi di UK melalui aktor sekuritisasi “UKIP”, di mana “pengungsi” dikategorikan sebagai salah satu variabel yang turut mempengaruhi bangkitnya paham “*Euroscepticism*” di Eropa. Kehadiran

pengungsi di UK pun melahirkan ketidakmerataan ekonomi akibat pemerataan ekonomi yang timpang dan disinyalir sebagai ancaman ekonomi sebagai *referent object*. Hubungan relasional tersebutlah yang membentuk persepsi bahwa bentuk ancaman keamanan di UK adalah ancaman ekonomi. Dalam pembentukan wacana tersebut, isu pengungsi termasuk kedalam *non-politicized*. Masuknya paham euroskeptisisme di UK turut mempengaruhi opini publik masyarakat UK yang memudahkan partai sayap kanan UKIP menjadi eksis dan populer. Isu ini kemudian dikategorikan (*politicized*) melalui *securitizing actor* yaitu partai politik sayap kanan UKIP yang diwakilkan oleh pidato Nigel Farage selaku pemimpin UKIP. Wacana yang digaungkannya pun menyasar pada aspek ekonomi akibat ketidakmerataan ekonomi sehingga wacana yang digaungkan berhasil menjadi objek referen (*referent object*).

Penelitian ini pun menemukan bahwa terdapat hubungan relasional dimana pengungsi sebagai variabel penunjang bangkitnya paham *Euroscepticism* di UK, UKIP sebagai varibel yang menjadi *securitization actor* dan *Euroscepticism* di UK sebagai variabel penunjang bangkitnya semangat UKIP dalam menyerukan bentuk ancaman dari implikasi kehadiran pengungsi di UK dengan bentuk ancaman berupa ancaman keamanan ekonomi. Begitupun dalam pembentukan wacana, isu pengungsi termasuk kedalam *non-politicized*. Masuknya paham euroskeptisisme di UK turut mempengaruhi opini publik masyarakat UK yang memudahkan partai sayap kanan UKIP menjadi eksis dan populer. Isu ini kemudian dikategorikan (*politicized*) melalui *securitizing actor* yaitu partai politik sayap kanan UKIP yang diwakilkan oleh pidato Nigel Farage selaku pemimpin UKIP. Wacana yang digaungkannya pun menyasar pada aspek ekonomi akibat ketidakmerataan ekonomi sehingga wacana yang digaungkan berhasil menjadi objek referen (*referent object*).

Hal ini memberikan pemahaman secara luas bahwa temuan ini dapat memberikan gambaran secara spesifik dan analitik dari suatu fenomena yang begitu kompleks, dalam hal ini, fenomena pengungsi di UK. Diharapkan pula artikel ini dapat memberikan kita sikap berhati-hati dalam mengasumsikan

sebuah fenomena secara pragmatis. Namun, upaya yang harus dilakukan adalah dengan ,eneliti terlebih dahulu akar permasalahan dari suatu fenomena yang begitu kompleks, sebagaimana halnya dengan fenomena pengungsi di UK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alex Szczerbiak, P. T. (2003). Theorizing Party-Based Euroscepticism: Problems of Definition. *The 8th Biannual International Conference of the European Union Studies Association*.
- Alfiyah, N. I., & Andrianingsih, V. (2021). Dampak Krisis Ekonomi Yunani terhadap European Economic Community (EEC). *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(1), 55–62.
- Burns, J. F. (2013). *Insurgent Party in Britain Gains in Popular Support*. The New York Times.
- Cable, V. (1995). What is International Economic Security? *International Affairs*, 71(2).
- Deacon, D., & Wring, D. (2015). The United Kingdom Independence Party (UKIP) and the British Press: Integration, Immigration and Integrity. *Political Parties in the Digital Age*, 129–148. <https://doi.org/10.1515/9783110413816-008>
- Dutta, A. (2018). *Rising Euroscepticism in Europe: An Assessment*.
- European Council. (2015). *Decision EU 2015-1523 14-9-2015 Prov Measures InProt Greece Italy* (Issue September).
- Eurostat. (2019). *Asylum Statistics*.
- Evans, G., & Mellon, J. (2019). Immigration, Euroscepticism, and the rise and fall of UKIP. *Party Politics*, 25(1), 76–87. <https://doi.org/10.1177/1354068818816969>
- Farage, N. (2013). Nigel Farage - 2013 Speech to UKIP Conference. *The Party Conference*.
- Hadley Gamble, H. E. (2015). *The UK Shouldn't Take More Migrant: Farage*. CNBC.
- Hainsworth, P. (2008). *The Extreme Right in Western Europe*. Routledge.
- Hansen, H. S. (2008). *Euroscepticism: A Multidimensional Understanding of the Concept and a Comparative Analysis of Public Scepticism in Britain and Denmark*. Aalborg University.
- Heywood, A. (2014). *Global Politics*. Macmillan International Higher Education.
- Hubé, N., Salgado, S., & Puustinen, L. (2016). The Euro Crisis' Actors and their Roles. *Politique Européenne*, N° 52(2), 84–113.

<https://doi.org/10.3917/poeu.052.0084>

- Idrus, M. R. H. (2021). *Prospek Kebijakan Inggris Terhadap Pengungsi Pasca Brexit*. Hasanuddin University.
- J, Sperling, E. K. (1997). *Recasting the European Order: Security Architectures and Economic Co-operation*. Manchester University Press.
- Kensy Dewi Asmiantyningsi, A. D. (2021). Hubungan Yunani dan Uni Eropa Pasca Krisis Yunani Tahun 2010. *Global Political Studies Journal*, 5(1).
- Llano, C. H. del. (2019). The Refugee Crisis in the European Union. *La Albolafia Revista de Humanidades Y Cultura*, 135–148.
- Milio, S. (2014). *Impact of the Economic Crisis on Social, Economic and Territorial Cohesion of the European Union*. 160.
- Nourbakhsh, S. N., Ahmadi, S. A., Dero, Q. Y., & Rad, A. F. (2022). Rise of the Far Right parties in Europe: from Nationalism to Euroscepticism. *Geopolitics Quarterly*, 18(68), 47–70.
- Office for National Statistics. (2015). Statistical Bulletin: Migration Statistics Quarterly Report, August 2015. *Statistical Bulletin*, 1–38.
- Rahmat, A. N. (2020). Realisme Dalam Kebijakan Penolakan Pengungsi Dan Migran Oleh Hungaria Tahun 2015-2018. *Jurnal Dinamika Global*, 5(01), 47–64. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.192>
- Refugee Week. (20015). *The Heritage and Contributions of Refugees to the UK – a Credit to the Nation*.
- Schneider, C. (2014). *Euroscepticism in Right-Wing Parties A Comparative of Three Emerging Right-Wing Parties*. University of Twente.
- Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic di Eropa. *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 13–35.
- Suwardi, S. S. (2004). Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 2(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.1.2>
- Taylor, R. W. M. & K. I. (2007). *Introduction to Global Politics*. Routledge.
- Traynor, I. (2013). *Crisis for Europe as Trust Hits Record Low*.
- Ullrich Fichtner, Maximilian Popp, C. S. & A. S. (2015). *The EU's Shipwrecked Refugee Plan*. Spiegel International.
- UNHCR. (1951). Protocol. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*.
- Vasilopoulou, S. (2003). Varieties of Euroscepticism: The Case of the European Extreme Right. *Journal of Contemporary European Research*, 5(1)